BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan pengguna kendaraan bermotor dimana perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ketahun dirasa meningkat cukup besar berdasarkan data UPTD Surabaya Timur jumlah kendaraan pribadi tahun 2013 sebesar 410.235 sedangkan untuk target Pajak kendaraan bermotor dari tahun 2009-2013 adalah sebesar 309.071.562.000 terlebih degan mudahnya kendaraan tersebut diperoleh dari kredit kendaraan bermotor namun dalam peraturan pemerintah melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 kendaraan bermotor telah

dikenakan pajak oleh pemerintah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sering kali masyarakat tidak memperhatikan mengenai status pengenaan pajak berdasarkan tarif atau sanksi yang dibebankan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maupun status Wajib Pajak atas kepemilikan dan domisili.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan membiayai rumah tangga Negara, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi.Dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif ditentukan berdasarkan nilai jual dikalikan tarif. Nominal pajak yang dibebankan akan semakin meningkat berdasarkan status pengenaan pajak, masyarakat yang sering mengacuhkan hal tersebut sering kali tidak pernah berfikir akan kewajiban yang semakin meningkat dengan jumlah pajak terutang vyang semakin besar ketika surat pemberitahuan pajak terus keluar berdasarkan status pajak.

Unit Pelayanan Teknis Surabaya Timur adalah sebuah kator yang mengelola penerbitan dan penetapan pajak kendaraan bermotor dalam sebuah instansi ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dimonitiri oleh kantor pusat dipenda jatim beberapa kegiatan teknis untuk penerbitan surat ketetapan pajak daerah , surat tagihan pajak daerah , dan sangsi atas keterlambatan pengenaan pajak juga diterbitkan di kantor terrsebut.

Beberapa kegiatan yang terdapat dalam instansi tersebut dipimpin oleh kepala bagian dari setiap kegiatan pendataan , tata usaha dan bagian penagihan atau dinas luar, bagian-bagian tersebut saling terkait dalam kegiatan untuk menetapkan pajak kendaraan bermotor, UPTD Surabaya Timur juga dipimpin oleh satu kepala UPTD daerah. Di dalam kegiatan instansi ini terfokus pada bagian penagihan dan dinas luar terdapat sebuah peermasalahan penetapan status kendaraan bermotor yang yang menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang layak untuk dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, penerbitan surat ketetapan pajak daerah oleh UPTD Surabaya Timur untuk pengenaan pajak kendaraan bermotor masih menggunakan format lama dan tidak sesuai degan softwere yang digunakan untuk entri data status pajak kendaraan bermotor yang telah distatus berdasarkan pengenaan pajak dan sangsi pajak, selain itu petugas dinas luar UPTD Surabaya Timur juga menangani penetapan status kendaraan bermotor berdasarkan domisili dan status kendaraan tersebut.

Apabila terdapat Wajib Pajak yang pindah dan tidak menyertakan alamat dalam penetapan status yang terdapat pada surat ketetapan pajak daerah maka akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang domisilinya tidak jelas atau alamat tidak jelas sementara itu pada surat ketetapan pajak daerah juga terdapat status pindah, hal ini menyebabkan sebuah permasalahan yang dapat menimbulkan kesalahan untuk entri data status pada softwere SAAP (sistem aplikasi adminstrasi perpajakan) Unit Pelayanan Teknis Dipenda Surabaya Timur selain itu keterbatasan jumlah SDM juga berpengaruh dalam penyampaian surat-surat perpajakan tersebut kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Penetapan Pajak kendaraan Bermotor pada UPTD Surabaya Timur”.

1.2. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam Laporan Tugas Akhir ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan judul sebagai berikut :

Mekanisme

Adalah suatu cara kerja atau totalitas alur kerja pelaksanaan suatu program atau rangkaian aktivitas yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi atau intansi untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah direncanakan.

Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah sebuah kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berkaitan pengenaan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang di terbitkan di UPTD Surabaya Timur berdasarkan ketentuan yang berlaku baik berdasarkan tarif atau sangsi pajak.

UPTD Surabaya Timur

Adalah tempat peneliti melakukan penelitian.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan suatu masalah Bagaimana mekanisme penetapan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Surabaya Timur ?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengetahui mengetahui meknisme dan tata cara penetapan dan proses penerbitan surat ketetapan pajak daerah utuk pajak kendaraan bermotor.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

   Memberi masukan kepada instansi tersebut tentang tentang bagaimana surat ketetapan pajak daerah diterbitkan berdasarkan status pajak dan memberikan evalusi tentang sebuah permasalah yang berkaitan degan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Bagi Peneliti

   Sebagai studi banding antara teori yang diperoleh peneliti di perkuliahan yang berkaitan degan ketentuan perpajakan yang diterapkan di Unit Pelayanan Teknis Surabaya Timur.

3. Bagi Pembaca

   Memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca khususnya dalam bidang perpajakan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Ruang Lingkup

Peneliti memberikan ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD

Surabaya Timur, mulai dari penetapan, penerbitan, dan penyampaian surat perpajakan kepada Wajib Pajak berdasarkan status pajak dan status kendaraan bermotor.

1.6.2. Prosedur Pengambilan Data

Dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan tiga metode, yaitu metode wawancara, observasi langsung ke perusahaan dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan status pajak kendaraan bermotor.

1. Wawancara

   Dilakukan dengan bagian pendataan dan bagian penagihan yang terdapat pada UPTD Surabaya Timur.

2. Observasi

   Melihat langsung proses dan kegiatan yang berkaitan dengan proses penerbitan surat ketetapan pajak dan penetapan status oleh petugas dinas luar.

3. Dokumentasi

   Mengumpulkan data berupa dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penetapan pajak kendaraan bermotor.